

Transformasi Tutupan Lahan di Kawasan Hutan Wilayah Kawasan Strategis Nasional Danau Toba

* Marris Hendra Sifindaon, Doddy Aditya Iskandar

¹Departement Tehnik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota/Universitas Gadjah Mada (UGM)

*mars7784@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 28 -07 - 2020

Disetujui: 20 -08 - 2020

Kata Kunci:

Kawasan Hutan
Danau Toba
Deforestasi
Tutupan Lahan
KSN (Kawasn Strategis Nasional)

ABSTRAK

Abstrak: Pengembangan wilayah tidak lepas dari pemanfaatan ruang, tetapi ketersediaan ruang di Danau Toba sangat terbatas. Hampir separuh wilayah KSN Danau Toba merupakan kawasan hutan sehingga banyak aktivitas masyarakat, swasta dan Pemerintah yang bersinggungan dengan persoalan hutan. Dalam kurun waktu 15 tahun tutupan lahan hutan di wilayah ini telah mengalami perubahan dari yang sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptive kuantitatif. Hasil dari tulisan ini adalah kondisi tutupan lahan hutan di sekitar Danau Toba yang secara fisik tidak lagi ideal seperti kawasan hutan pada umumnya yang dipengaruhi oleh historis, kultural dan akitivtas stakeholder diatasnya dalam beberapa tahun ini.

Abstract: *Regional development cannot be separated from the use of space, but the availability of space in Lake Toba is very limited. Nearly half of the Lake Toba KSN (national strategic area) is a forest area, so that many community, private and government activities intersect with forest issues. Within 15 years the forest land cover in this region has changed from the way it should be. The method used in this paper is quantitative descriptive. The results of this paper are the condition of forest land cover around Lake Toba which is physically no longer ideal like the forest area in general which is influenced by the historical, cultural and stakeholder activities above in recent years.*

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan wilayah melalui Pembangunan yang berkesinambungan selalu menekankan pada integrasi tiga pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan seharusnya bisa menjadi jawaban apabila dalam pembangunan di setiap daerah memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan. Integrasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan merupakan kunci suksesnya pembangunan yang dapat mendorong berkembangnya sebuah wilayah dengan baik.

Kebijakan pengembangan wilayah melalui penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional memacu pembangunan yang semakin pesat hampir di seluruh wilayah KSN (Kawasan Strategis Nasional) Danau Toba. Sebagaimana diketahui bersama ketersediaan lahan untuk pembangunan disekitar Kawasan Danau toba sangat terbatas dan dibatasi oleh keunikan kultur kepemilikan lahan yang masih bersifat tradisional dimana pemilikan lahan masih bersifat komunal sehingga memerlukan proses yang lebih Panjang untuk dapat memanfaatkannya dan diyakini memerlukan biaya yang lebih mahal. Disamping itu hampir separuh wilayah Kawasan Danau Toba merupakan kawasan hutan sehingga tidak dapat dihindari penggunaan areal kehutanan dalam rangka

pengembangan wilayah di KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba

Pada RPJMN 2015-2019, penetapan kawasan strategis difokuskan pada percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Hingga akhir tahun 2015, dari 76 KSN tersebut, baru 13 RTR KSN yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, salah satunya adalah penetapan KSN Danau Toba yang ditetapkan melalui Perpres No. 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. (BAPPENAS, 2016)

Briassoulis (2000) dalam Sinurat (2015) menyatakan bahwa Penggunaan lahan atau penutupan lahan merupakan unsur penting dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan yang berhubungan dengan permukaan 7 bumi. Terminologi penggunaan lahan (*land use*) dan penutupan lahan (*land cover*) sering bertukar tempat dalam memaknainya walaupun pada dasarnya istilah tersebut memiliki arti yang relatif sama yaitu menggambarkan fisik permukaan bumi. Sebagaimana dikemukakan pengertian *land use* merujuk pada sifat biofisik lahan yang menggambarkan fungsi atau tujuan lahan digunakan, dijelaskan sebagai aktivitas manusia yang secara langsung berkaitan dengan lahan, penggunaan dari sumber daya tersebut atau memberikan dampak terhadapnya sedangkan pengertian *land cover* menurut Lambin et al. (2003) adalah atribut permukaan bumi dan di bawah

permukaan termasuk biota, tanah, topografi, permukaan dan air bawah tanah serta struktur manusia.

Lambin et al. (2003) dalam Sinurat (2015) mengemukakan penggunaan lahan merupakan tujuan manusia mengeksploitasi penutup lahan. Terdapat berbagai variasi dalam ruang dan waktu dalam lingkungan biofisik, aktivitas ekonomi dan konteks kultural yang berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan. Mengidentifikasi penyebab perubahan lahan membutuhkan pemahaman bagaimana manusia memutuskan penggunaan terhadap lahan dan ada berapa jenis faktor yang berinteraksi secara spesifik mempengaruhi tujuan penggunaan lahan. Keputusan penggunaan lahan ini dipengaruhi faktor dalam skala lokal, regional dan global. Perubahan penggunaan lahan bersifat dinamis dan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan wilayah dari waktu ke waktu.

Barbier dan Burges (2001) dalam Djaenudin (2016) menyatakan dalam suatu survey terhadap studi ekonomi dari deforestasi tropis dan penggunaan lahan. Studi konversi lahan hutan tropis ini merupakan tingkat penjelajahan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan pertanian adalah faktor utama yang menunjukkan perluasan lahan usaha, tapi faktor institusi juga sangat berpengaruh. Dalam tulisan ini juga dibahas tentang faktor yang mempengaruhi deforestasi melalui keputusan penggunaan lahan. Selain itu Andersen et al. (2002) juga menyimpulkan bahwa penyebab deforestasi antara lain pengembalaan, pertanian, penebangan hutan, dan pertambangan. Pfaff (1999) membangun model penggunaan lahan yang mengandung banyak faktor penentu deforestasi di Amazon Brazilia dengan menggunakan data tutupan hutan dan sosial ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa penyebab utama dari terjadinya deforestasi adalah kualitas lahan dan biaya transportasi (jarak ke pasar) yang tinggi. Di samping itu proyek pembangunan pemerintah juga nampaknya mempengaruhi penebangan hutan walaupun kredit infrastruktur tidak mempengaruhi penebangan hutan. Kepadatan penduduk tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap deforestasi ketika banyak faktor penentu diikutkan.

Pada fase deforestasi terdapat dua tahapan. Pertama adalah dibukanya akses terhadap hutan dengan dibangunnya infrastruktur jalan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta (jalan logging, pertambangan, dan lain-lain). Situasi ini mendorong meningkatnya nilai lahan pertanian dengan tersedianya pasar baru sehingga memotivasi terjadinya perpindahan penduduk ke daerah tersebut. Kedua, setelah bertambahnya penduduk di daerah tersebut maka meningkatkan terhadap kebutuhan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pemukiman. Pengaruh tekanan populasi ini disertai dengan kegiatan produktif lainnya akan meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya hutan (Angelsen 2007 dalam Djaenudin (2016)) dan laju deforestasi yang tinggi.

Release (*World Bank*, 1997) yang dikutip kedalam Disertasi Novra, A. 2007 menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan merupakan suatu fenomena mendasar dalam sistem bumi yang dinamis. Dimana pada suatu negara berkembang ekspansi pertanian, logging kehutanan, pengembangan industri pada waktu bersamaan berlangsung sangat intensif. Perubahan penggunaan lahan mencakup konversi dari suatu

bentuk penggunaan ke penggunaan lain seperti perubahan pola penggunaan suatu areal lahan, modifikasi bentuk penggunaan lahan tertentu seperti perubahan dalam intensitas penggunaan sehingga mengubah karakteristik lahan termasuk perubahan dari pemukiman masyarakat berpendapatan rendah menjadi pemukiman masyarakat berpendapatan tinggi, perubahan dari hutan negara menjadi hutan kota untuk sarana rekreasi (Brissoulis, 2004). Kemudian menurut Berger, 2003 dalam disertasi Novra, A. (2007) menyebutkan faktor pendorong perubahan penggunaan lahan sebagai predeposisi bagi proses deforestasi dapat dikelompokkan atas faktor pendorong sosial dan faktor pendorong biofisik. Hubungan antara pelaku, proses dan faktor pendorong perubahan penggunaan lahan disajikan



pada Gambar berikut

Gambar 1. faktor Pendorong Perubahan Lahan (Sumber: Berger, 2003)

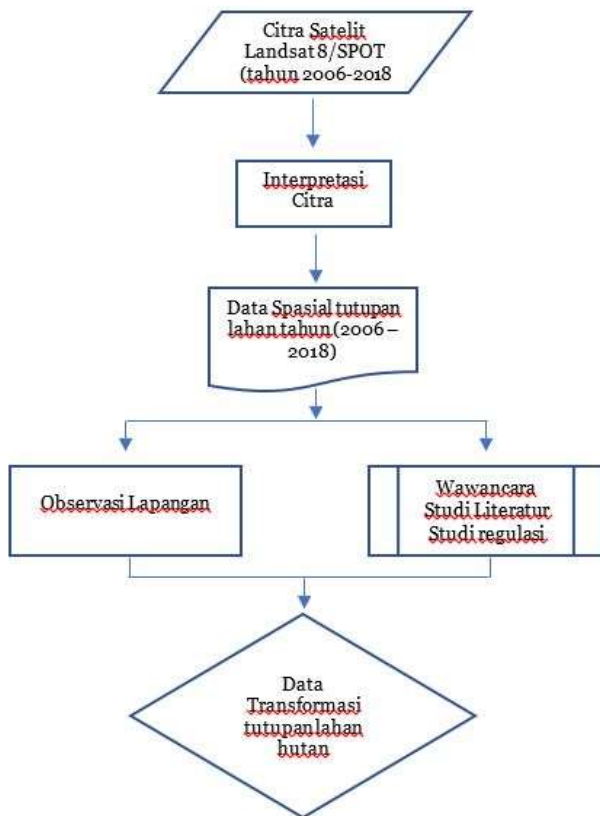
Salah satu sektor pembangunan yang saat ini gencar untuk dikembangkan pada kawasan strategis nasional (KSN) adalah sektor Pariwisata. Saat ini secara keseluruhan di Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam Pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Dewasa ini perkembangan dan pembangunan sektor pariwisata juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam perubahan tutupan lahan. Demikian halnya juga dengan wilayah disekitar Danau Toba yang terbatas secara lahan dan hampir separuh merupakan kawasan hutan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber banyak terdapat spot-spot wisata potensial yang berda didalam kawasan hutan yang akan dikembangkan untuk mendukung dunia wisata. Hal ini senada menurut Gossling dalam (Hakim, 2004) bahwa aktivitas wisata dikawasan lindung menduduki peringkat kedua sebagai faktor pengaruh kerusakan kawasan lindung. Dari daftar faktor-faktor pengaruh kerusakan kawasan lindung lainnya. Lebih lanjut berbagai studi menunjukkan bahwa dampak aktivitas wisata terhadap lingkungan, kemasyarakatan dan ekonomi menjadi sangat kompleks. Tekanan terhadap kawasan lindung akibat berkembangnya aktivitas wisata yang tidak pernah terpikirkan yakni hubungan antara perkembangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam.

Sebagaimana diketahui bersama ketersediaan lahan untuk pembangunan disekitar Kawasan Danau toba sangat terbatas dan dibatasi oleh keunikan kultur kepemilikan lahan yang masih bersifat tradisional dimana pemilikan lahan masih bersifat komunal

sehingga memerlukan proses yang lebih Panjang untuk dapat memanfaatkannya dan diyakini memerlukan biaya yang lebih mahal. Disamping itu hampir separuh wilayah Kawasan Danau Toba merupakan kawasan hutan sehingga tidak dapat dihindari penggunaan areal kehutanan dalam rangka pengembangan wilayah di KSPN Danau Toba.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, Analisa data primer dengan melakukan intepretasi Tutupan lahan terhadap tutupan lahan pada citra satelit Landsat TM 8 dan SPOT 6 Tahun 2006, 2009, 2012, 2015 dan 2018. kemudian pengumpulan data terkait dengan studi literatur, data sekunder dan wawancara dan observasi lapangan. Urutan penelitan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Tahapan Penelitian

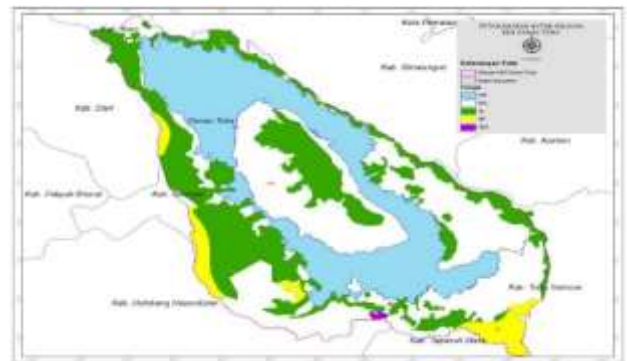
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Tutupan Lahan Kawasan Hutan KSN Danau Toba

Ruang wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dimana Kawasan ini meliputi 7 (tujuh) Kabupaten yang berada mengelilingi danau toba yaitu Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan,

Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten

Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba Samosir di Provinsi Sumatera Utara. Luas Daratan Kawasan Strategis Nasional ini berdasarkan hasil analisis GIS (*Geographic Information System*) adalah $\pm 258.711,37$ Ha dengan luas perairan kawasan Danau Toba adalah $\pm 112.093,76$ Ha, total luas secara keseluruhan wilayah KSN Danau Toba adalah $\pm 370.805,13$ H. Berdasarkan informasi dan data yang ada sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan hutan Sumatera Utara bahwa luasan Kawasan hutan di wilayah KSPN Danau Toba adalah $\pm 115.484,04$ Ha, atau bila kita bandingkan dengan luas daratan KSN danau toba maka persentase luas hutan adalah sekitar 44,64 %. Sehingga ini menjadi salah satu isu yang juga akan banyak dibahas dalam penelitian ini.



Luas Kawasan hutan per kabupaten dalam wilayah KSN dapat dilihat pada peta dan tabel berikut:

Gambar 3. Peta Kawasan Hutan Wilayah KSPN Danau Toba

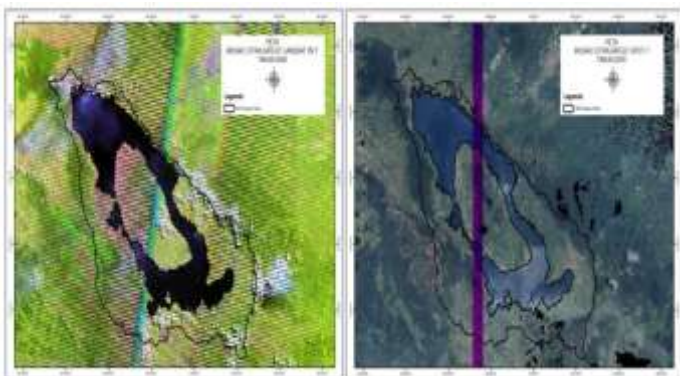
Luasan kawasan pada tiap Kabupaten ada pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten dalam KSN Danau Toba

No	Kabupaten	Fungsi Kawasan			Total
		HL	HP	HSA	
1	Kab. Dairi	5,949.19	1,348.93		7,298.13
2	Kab. Humbang Hasundutan	12,482.72	3,485.84	403.47	16,372.03
3	Kab. Karo	3,366.98			3,366.98
4	Kab. Samosir	49,121.23	3,782.08		52,903.32
5	Kab. Simalungun	9,298.79	70.88		9,369.67
6	Kab. Tapanuli Utara	3,288.70	6,304.70		9,593.40
7	Kab. Toba	14,627.32	1,953.20		16,580.51
Grand Total		98,134.93	16,945.63	403.47	115,484.04

Sumber: Hasil Analisis Data

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 579/Menhut/2014 luasan kawasan hutan didalam kawasan strategis nasional (KSPN) Danau Toba adalah sebagai berikut: Hutan Produksi $\pm 16.945,63$ Ha, Hutan Lindung $\pm 98.137,99$ Ha dan Hutan Suaka Alam (HSA) $\pm 403,47$ Ha tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten wilayah KSPN Danau Toba, dimana terdapat satu izin konsesi IUPHHK-HT PT. Toba Pulp Lestari, Tbk di dalam kawasan ini.



Gambar 4. Citra Landsat 2006 dan SPOT 2018 KSN Danau Toba

Hasil interpretasi tutupan lahan pada kawasan hutan di KSN Danau Toba dari tahun 2006 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada data tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perubahan luas tutupan lahan Kawasan Hutan di KSN Danau Toba tahun 2006 s/d 2018

ID	Luas (Ha)				
	2006	2009	2012	2015	2018
HnP	11,03	-	-	-	-
HnS	29.844,91	31.162,45	30.321,72	29.353,29	29.222,23
Ht	27.508,46	30.233,23	28.410,94	28.949,67	27.884,48
B	9.373,10	5.133,13	5.191,43	5.409,39	15.397,30
P	41,24	41,24	41,24	44,93	45,31
Lh	26.783,45	26.461,19	28.807,40	28.866,20	16.326,59
Tb	4,90	4,90	4,90	4,90	5,76
PLk	13.634,25	21.784,59	22.029,42	21.924,55	25.043,11
PLkc	7.681,99	-	-	254,11	916,68
S	536,50	631,94	645,63	645,36	645,63
R	67,26	34,41	34,41	34,41	-
	115.487,09	115.487,09	115.487,09	115.487,09	115.487,09

Sumber: Hasil Analisis Data

Ket:

HnP = Hutan primer, HnS = Hutan sekunder, Ht = Hutan Tanaman, B = Belukar, P = Permukiman, Lh = Lahan Terbuka, Tb = Tubuh air, PLk = Pertanian lahan kering, PLkc = Pertanian lahan kering campuran, S = Sawah, R = Rawa



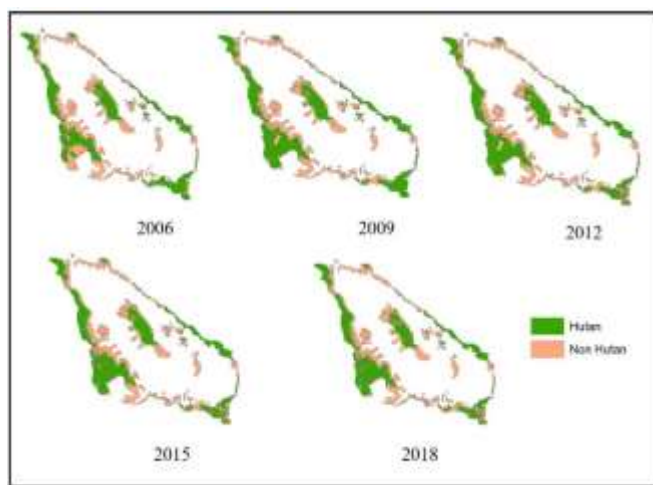
Gambar 5. Grafik Perubahan Tutupan Lahan

Dari data diatas diketahui bahwa pada kawasan hutan Danau Toba saat ini tidak lagi hanya tutupan lahan hutan saja, akan tetapi pada kawasan ini sudah terdapat aktivitas diluar kehutanan seperti adanya pertanian lahan kering (PLk), pertanian lahan kering campuran (PLkc) dan Permukiman (P) dimana tutupan lahan non kehutanan yang tertinggi pada tahun 2018

adalah pertanian lahan kering dengan luas 25.053, 11 Ha dan pada tutupan lahan tahun ini terdapat peningkatan tutupan lahan belukar (B) dari tahun 2015 seluas 5.409, 39 Ha meingkat pada tahun 2018 menjadi 15.397,30 Ha.

Tutupan lahan pada kawasan hutan sangat dinamis dan berubah, dimana kondisi hutan semakin menurun dan luas tutupannya berkurang. Beberapa kegiatan yang ditengarai sebagai penyebab pengurangan luas hutan adalah konversi kawasan hutan untuk tujuan pembangunan sektor lain. Pada wilayah KSPN Danau Toba berdasarkan hasil pengamatan perubahan tutupan lahan hutan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas pariwisata tetapi disana ada aktivitas perladangan atau perkebunan, kemudian di wilayah KSPN danau toba juga banyak klaim-klaim tanah marga yang berada di dalam Kawasan hutan sehingga masyarakat disana merasa lebih berhak dalam hal pengelolaan di daerah tersebut

Untuk dapat mengetahui seperti apa transformasi tutupan lahan pada kawasan hutan di KSN Danau Toba pada penelitian ini mencoba mengkategorikan tutupan lahan tersebut menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu tutupan lahan "hutan" yang terdiri dari hutan primer (HnP), hutan sekunder (HnS) dan hutan tanaman (Ht) dan tutupan lahan "non hutan" terdiri dari belukar (B), permukiman (P), lahan terbuka (Lh), tubuh air (tb), pertanian lahan kering (PLk), pertanian lahan kering campur (PLkc), sawah (S) dan rawa (R). Dan berdasarkan hasil pengelompokan tersebut dapat kita lihat perubahan tutupan lahan hutan pada KSN Danau Toba dari tahun 2006 hingga tahun 2018 seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 6. Transformasi tutupan lahan hutan pada KSN Danau Toba

Berdasarkan hasil analisa data terhadap kedua kategori tutupan lahan hutan diatas diperoleh luasan tutupan lahan hutan dan non hutan pada KSN Danau Toba seperti pada tabel berikut ini

Tabel 3. Perubahan luas tutupan lahan Hutan dan Non Hutan di KSN Danau Toba tahun 2006 s/d 2018

ID	Luas (Ha)				
	2006	2009	2012	2015	2018
Hn	57.364,40	61.395,68	58.732,66	58.302,96	57.106,71
NHn	58.122,69	54.091,41	56.754,43	57.184,13	58.380,38
Total	115.487,09	115.487,09	115.487,09	115.487,09	115.487,09

Sumber: Hasil Analisis Data

Ket:

Hn = Hutan, N Hn = non hutan



Gambar 6. Grafik Perbandingan Hutan dan Non Hutan pada KSN Danau Toba

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui perubahan tutupan lahan hutan dan non hutan dari tahun 2006 hingga tahun 2018 pada KSN Danau Toba terlihat fluktuatif. Pada tahun 2006 tutupan lahan hutan adalah $\pm 57.364,40$ Ha, kemudian pada tahun 2009 terjadi kenaikan tutupan lahan hutan menjadi $\pm 61.395,68$ Ha dan setelah tahun 2009 tren tutupan lahan hutan hingga data terakhir tahun 2018 menurun menjadi $\pm 57.106,71$ Ha. Penurunan terhadap luasan tutupan hutan ini dapat dianggap sebagai salah satu gejala deforestasi yang terjadi pada KSN Danau Toba. Apabila kita lakukan perbandingan antara tutupan lahan hutan dan non hutan maka kita dapat bahwa tutupan lahan hutan adalah 49,45 % dan tutupan lahan non hutan adalah 50,55 %. Secara perbandingan terlihat bahwa kondisi tutupan lahan kawasan hutan KSN Danau Toba sudah tidak lagi ideal sebagaimana defenisi kawasan hutan yang secara umum kita ketahui.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Transformasi Tutupan Lahan pada Kawasan Hutan di Wilayah KSN Danau Toba

a. Kearifan Lokal dalam Kepemilikan Lahan

Pengembangan wilayah memerlukan ruang atau spasial untuk membangun, demikian halnya juga dengan pembangunan di wilayah KSN Danau Toba, dengan kondisi wilayah sekitar danau toba yang memiliki Kawasan hutan sekitar 44,64 % dari total luas daratannya sehingga pemanfaatan lahan di kawasan hutan menjadi hal susah untuk dihindari. Sejak tahun 2016 diwilayah KSN Danau Toba telah menjadi salah satu kawasan prioritas yang akan dikembangkan oleh Pemerintah dengan membangun sektor wisata.

Kebijakan pengembangan KSPN Danau Toba tidak dapat menghindari penggunaan lahan Kawasan hutan untuk mengimpelentasikan pembangunan, baik untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, jembatan, IPAL, sumber-sumber air, embung, amenitas wisata, perhotelan dan restoran dan yang lainnya maupun pembangunan nonfisik yang melibatkan masyarakat disekitar Kawasan hutan yang berada diwilayah KSPN Danau Toba. Masyarakat disekitaran danau toba memiliki keunikan masing-masing dalam penggunaan lahan disekitar danau toba. Hal ini disebabkan karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dan memiliki kearifan lokal yang berbeda. Disekitar Danau toba terdapat beberapa suku batak yaitu: Batak Toba, Simalungun, Karo, dan Pakpak.

Kabupaten Samosir maupun di Daerah Dairi tepanya di Kecamatan Silalahi Sabungan, di dua tempat ini dikenal istilah kepemilikan lahan komunal yang Namanya adalah "Golat". Golat adalah tanah warisan leluhur yang diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu dalam hal ini sebuah marga tertentu di wilayah tersebut. Golat hingga saat ini belum dibagi secara individu hingga saat ini. Kepemilikan golat adalah komunal milik marga tertentu disuatu desa di tempat tersebut. Untuk bisa memanfaatkan tanah golat ini prosesnya sangat Panjang karena harus melibatkan semua anak cucu pewaris tanah baik yang ada didaerah tersebut maupun yang berada diperantauan, karena itu sudah menjadi kearifan lokal yang berada diwilayah tersebut. Hal-hal seperti inilah yang memang sering menjadi persoalan dalam pengembangan pariwisata di KSPN danau toba sehingga memang Kawasan hutan merupakan salah satu solusi untuk mempercepat proses pembangunan mendukung kebijakan tersebut. Ini adalah salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi transformasi tutupan lahan pada kawasan hutan KSN Danau Toba.



Gambar 7. (1) sebahagian kawasan hutan di Sibisa yang menjadi Perladangan Jagung mekanis, (2) Pematangan lahan di kawasan hutan daerah Simarjarunjung, (3) Kawasan hutan yang menjadi geosite, (4) Pembangunan jalan desa melalui kawasan hutan.

b. Kepastian Regulasi yang mengatur persoalan kawasan hutan

Berbicara permasalahan Kawasan hutan disekitar danau toba kita tidak dapat melepaskan juga sebenarnya dari permasalahan Kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara. Banyaknya klaim-klaim masyarakat atas kepemilikan lahan hutan sebagai tanah adat maupun tanah leluhur mereka ataupun perusahaan-perusahaan dibidang perkebunan yang memanfaatkan Kawasan hutan, tidak bisa kita lepaskan dari kronologis maupun peristiwa-peristiwa sejarah penunjukan Kawasan hutan itu. Disamping itu terdapat kebijakan prioritas pembangunan yang tumpang tindih dengan regulasi kehutanan. Sebagaimana pengembangan suatu wilayah yang diikuti dengan proses pembangunan diatas tanah pada wilayah itu baik terhadap pembangunan fisik berupa infrastruktur jalan, jembatan kemudian bangunan fisik lainnya yang memang mendukung terhadap pembangunan KSN Danau Toba. Salah satu persoalan yang dihadapi hampir diseluruh wilayah di 7 (tujuh) Kabupaten disekitar danau toba adalah ketersediaan lahan yang sangat terbatas sehingga ruang-ruang dalam pembangunan fisik juga menjadi terbatas karena harus berbenturan dengan status Kawasan hutan.

Berikut adalah sejarah ataupun kronologis penetapan kawasan hutan dan permasalahan penetapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara yang turut mempengaruhi transformasi tutupan lahan pada kawasan hutan KSN Danau Toba



Gambar 8. Kronologis penetapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara (sumber: hasil analisa wawancara)

c. Kondisi eksisting masyarakat

Permasalahan ruang kehutanan selanjutnya yang ada di wilayah KSPN Danau toba adalah kondisi eksisting dilapangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan peta-peta kehutanan yang ada. Banyak daerah yang sudah lama menjadi permukiman masyarakat masuk kedalam Kawasan hutan. Sebagai contoh ini dapat dilihat di daerah Simarjarungjung di Kabupaten Simalungun, Kecamatan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Silalahi di Kabupaten Dairi, maupun Desa Janji Maria di Kabupaten Samosir. Sesuai dengan SK 579/Menhut-II/2014 daerah-daerah tersebut merupakan sebahagian contoh yang eksisting nya sudah merupakan perkampungan yang telah lama ada tetapi masih belum dikeluarkan dari Kawasan hutan. Kondisi ini tentunya membuat masyarakat yang telah lama tinggal disana sejak “*opung-opung*” mereka tidak bisa untuk mendapat hak kepemilikan atas tanah mereka karena instansi yang berwenang tidak akan mau mengeuarkan sertifikat kepemilikan tanah di daerah tersebut.

Diakui oleh salah satu narasumber pada waktu itu memang penetapan Kawasan hutan TGHK yang dipadu serasikan dengan pola ruang Provinsi Sumatera Utara yang menjadi dasar penunjukan Kawasan hutan tidak melihat fakta yang ada dilapangan hanya berdasarkan skoring sehingga mengakibatkan banyak pemukiman yang masuk kedalam Kawasan hutan seperti di SK. 44/Menhut-II/2005 bahkan hingga saat ini setelah mengacu kepada SK.579/Menhut-II/2014 permasalahan ini belum 100 % bisa clear.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Tutupan lahan pada kawasan hutan di wilayah KSN Danau Toba sejatinya tidak ideal seperti defenisi

kawasan hutan yang kita ketahui secara umum. Saat ini tutupan lahan dikawasan hutan KSN Toba justru didominasi oleh tutupan lahan non hutan (lahan pertanian, permukiman, semak belukar dan lahan terbuka) sebesar $\pm 58.380,38$ Ha (50,55 % dari luas kawasan hutan). Transformasi tutupan lahan hutan dari tahun 2009 hingga data terakhir penelitian ini (2018) cenderung bergeser kearah tutupan lahan non hutan. Dalam kurun waktu tersebut tutupan lahan hutan telah berkurang sekitar $\pm 4288,97$ Ha.

Transformasi tutupan lahan pada kawasan hutan KSN Danau Toba menurut penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kearifan lokal kepemilikan lahan pada masyarakat disekitar kawasan Danau Toba kemudian persoalan kepastian regulasi yang mengatur persoalan kawasan hutan serta kondisi eksisting masyarakat yang memang telah lama berdomisili disekitar maupun didalam kawasan hutan. Peneliti tidak menutup kemungkinan adanya faktor yang lain yang dapat mempengaruhi transformasi tutupan lahan pada kawasan hutan sehingga diharapkan ada kajian atau penelitian lanjutan yang dapat lebih dalam mengulas secara komprehensif terkait dengan persoalan transformasi tutupan lahan hutan.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] BAPPENAS. (2016). *Kajian Telaah Kritis Penetapan Kawasan Strategis Strategis Dalam RPJMN dan RTRWN*
- [2] Djaenuddin, D. (2016). *Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Dinamika Penggunaan Lahan di Indonesia*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- [3] Ernan Rustadi, Sunsun Saefulhakim, D. R. P. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah* (edisi pert; A. E. Pravitasari, Ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- [4] FAO. (1996). *Forest Resource Assessment 1990 : Survey Of Tropical Forest Cover and Study of Change Process*. Rome
- [5] Gossling, S. (1999). *Ecotourism : A Means to Safeguard Biodiversity and Ecosystem Function? Ecological Economics*
- [6] Hakim, L. (2004). *Dasar - Dasar Ekowisata* (Edisi Pert). Malang: Bayumedia Publishing.
- [7] KLHK, T. (2018). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018* (Edisis Per; S. Nurbaya, Ed.). Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- [8] Novra, A. (2007), *Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Deforestasi Kawasan dan Degradasi Taman Nasional Kerinci Sebelat*. Bogor, Sekolah Pascasarjana Institut pertanian Bogor.
- [9] Pemerintah RI, 1999, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, Jakarta, Sekretariat Negara RI
- [10] Pemerintah RI, 2004, *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan kawasan Hutan dan Perairan Provinsi*

Sumatera Utara, Jakarta, Sekretariat Jenderal
Kementerian Kehutanan

- [11] Pemerintah RI, 2014, *Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
- [12] Sinurat, TP (2015), *Model Perubahan Tutupan Lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, Bogor*, Sekolah Pascasarjana Institut pertanian Bogor.
- [13] Sudaryono. (2016), *Metode Penelitian Pendidikan* (Edisi Pertama). Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama